

# PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

( Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur )

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana EKONOMI  
Progdi Akuntansi



Oleh:

Putu Istaguein Ryan P

1013010054

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2013-2014

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)  
TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(LKPD)

(Studi pada dinas pekerjaan umum pengairan provinsi jawa timur)

Disusun oleh :

Putu Istaguein Ryan P

1013010054/FEB/EA

Telah dipertahankan Dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Progdi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 17 April 2014

Pembimbing :  
Pembimbing Utama

Tim Penguji :  
Ketua

Prof.Dr.H.Soeparlan Pranoto, MM, AK, CA

Prof.Dr.H.Soeparlan Pranoto, MM, AK, CA

Sekretaris

Dra. Ec.Dyah Rahmawati, MM

Anggota

Drs.Ec.R.Syarief Hidayat,Msi

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa timur

Dr. H . Dhani Ichsanuddin Nur, MM

NIP. 19630924 198903 1001

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, kenikmatan dan anugrahnya yang tak terhingga sehingga saya berkesempatan menimba ilmu hingga jenjang perguruan tinggi. Berkat rahmatnya pula,memungkinkan saya untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH (LKPD)”

Sebagaimana diketahui bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Walaupun dalam penulisan skripsi ini penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki,tetapi penulis yakin tanpa adanya saran dan bantuan maupun dorongan dari beberapa pihak maka skirpsi ini tidak akan mungkin tersusun sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Teguh Soedarto, MP, selaku rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. H. Dhani ichsanudin N., MM, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Rahman Amrullah Suwaidi, MS, selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Dr. Hero Priono,M.Si, AK, Selaku Progdi Akuntansi Dekan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Prof. DR. H. Soeparlan Pranoto, MM, AK, CA Selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dengan sabar memberi pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen yang telah memberikan bannyak bekal ilmu pengetahuan dan suri tauladan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Orang tua,dan adik yang telah memberikan semangat dan doa pada saat pembuatan skripsi.
8. Teman-teman saya jamal, Helmi, Arif, agung, acil, risky kurniawan, risky brianta, budiman, gio, dimas, bram, nova, firda, epol, dewi, yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi sehingga proses pengerjaan lebih mudah.
9. Seluruh pegawai Dinas Pekerjaan umum pemprov jatim yang telah membantu memperoleh informasi dalam penyusunan skripsi ini
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini sampai selesai

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna,walaupun demikian saran dan petunjuk yang

bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaanya. Penulis mengharapkan Penelitian ini dapat menambah pengetahuan kita serta bermanfaat bagi semua pihak

Surabaya, 1 April 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang penelitian .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	6
1.3 Tujuan penelitian.....	6
1.4 Manfaat penelitian .....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	7
2.1. Penelitian terdahulu.....	7
2.2 Landasan teori.....	9
2.2.1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).....	9
2.2.1.1 Lingkungan Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No 71 tahun 2010.....	10
2.2.1.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Menurut PP No 71 Tahun 2010.....	10
2.2.2. Transparansi Laporan Keuangan Daerah.....	14

2.3 Kerangka Pemikiran.....	21
2.4 Hipotesis.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1. Objek penelitian .....	23
3.2. Operasionalisasi Variabel .....	23
3.2.1. Variabel Bebas X .....	23
3.2.2. Variabel Bebas Y.....	23
3.2.3. Pengukuran Variabel.....	23
3.3. Populasi dan Sampel .....	26
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.5 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.....	32
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Deskripsi hasil penelitian .....	40
4.1.1 Penerapan standar akuntansi pemerintahan .....	41
4.1.2 Transparansi Laporan keuangan daerah .....	46
4.2 Partial least square (PLS) .....	51
4.2.1 Convergent validity .....	52
4.2.1.1 Indikator validitas .....	52
4.2.1.2 Reliabilitas konstruk .....	53
4.2.1.3 Nilai Average Variance Extracted (AVE) .....	54

4.2.2 Discriminant validity .....	54
4.2.3 Evaluasi modal structural .....	56
4.3 Pembahasan .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran .....	58
5.3 Keterbatasan .....	60
5.4 Implikasi .....	60
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir .....	25
4.1 Nilai rata-rata indikator relevan .....	42
4.2 Nilai rata-rata indikator andal .....	43
4.3 Nilai rata-rata dapat dibandingkan .....	44
4.4 Nilai rata-rata dapat dipahami .....	45
4.5 Nilai rata –rata indikator y1 .....	47
4.6 Nilai rata-rata indikator y2 .....	48
4.7 Nilai rata-rata indikator y3 .....	49
4.8 Nilai rata-rata indikator y4 .....	50
4.9 Nilai rata-rata indikator y5 .....	51
4.10 Kurva uji kausalitas .....	56

## DAFTAR TABEL

1.1 Opini BPK tentang LKPD di Indonesia tahun 2012 .....	6
2.1 Matriks Kebijakan yang Mengatur Penerapan Prinsip Transparansi dalam Keuangan Daerah .....	19
4.1 Interval Kelas Variabel X dan Y .....	41
4.2 Convergent Validity Ke-2 .....	52
4.3 Composite Reliability dan Cronbachs Alpha .....	54
4.4 Nilai AVE .....	54
4.5 Cross Loading .....	55
4.6 Uji hipotesis .....	56
4.7 nilai R-square .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner

Lampiran 2 Tabulasi jawaban responden

Lampiran 3 OUTPUT PLS DENGAN SMARTPLS

# PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH (LKPD)

(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur)

Putu Istaguein Ryan Parartha

## ABSTRAK

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah salah satu factor penentu transparansi laporan keuangan daerah (LKPD). Oleh karena itu penerapan SAP sangat diperlukan untuk memperoleh transparansi LKPD yang baik. Atas dasar pemikiran tersebut penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pengaruh penerapan SAP terhadap transparansi LKPD.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuisisioner di Dinas Pekerjaan umum Pengairan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas pekerjaan umum pengairan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling yang berjumlah 30 responden. Teknik yang digunakan adalah partial least square (PLS).

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh Standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap transparansi LKPD baik secara parsial maupun secara simultan.

Kata kunci : Standar akuntansi pemerintahan, Transparansi, laporan keuangan pemerintah daerah, Dinas P.U pengairan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem Pemerintahan yang demokratis membuka akses informasi dan mediasi bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya tanpa adanya ancaman dari pihak

berwenang. Hal ini juga menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengelolaan pemerintah yang baik (good government governance). Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas sering ditujukan kepada pemerintah daerah. Suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan. Transparansi dan keterbukaan dalam menjalankan dan mengimplementasikan roda birokrasi, hal ini tak luput juga terhadap sorotan masyarakat terhadap alokasi anggaran negara dan daerah yang kini tengah di distribusikan.

Masyarakat saat ini lebih jeli dan sensitif terhadap perkembangan pemerintahan negara. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang (UU) yaitu UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Lembaga pemerintahan khususnya DPR/DPRD yang memiliki kewenangan sebagai peracik dan pembuat UU di negeri ini haruslah esensial dan bijak. Penyusunan anggaran, baik anggaran yang masih berbentuk rencana anggaran dan keuangan (RAK) atau rencana anggaran dan belanja (RAB), dan juga laporan keuangan yang sudah di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran sebelumnya wajib di umumkan dan dimediasi kepada publik dengan media online seperti website, Pers, maupun papan pengumuman biasa. Sesuai UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) atau peraturan komisi informasi No.1 Tahun 2010 tentang standarisasi layanan informasi publik.

Pemerintah juga harus transparan dengan rencana anggaran negara secara berkala.

Salah satu wujud konkrit untuk mewujudkan transparansi pengelolaan laporan keuangan negara adalah diundangkannya Undang – Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan amanat Undang – Undang No.17 Tahun 2003 tersebut pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan, untuk mencapai tujuan tersebut standar ini menetapkan seluruh

pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Pada PP no 71 tahun 2010 menyatakan bahwa, SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

SAP Berbasis Kas Menuju Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Laporan keuangan pokok terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; (d) Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (PSAP, KK; 2010)

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (bad governance) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta) hal ini seperti dikuatkan oleh pendapat Sunarsip (2001). Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good governance. Oleh karena itu tuntutan terhadap terwujudnya good governance (tata kelola yang baik) sangat diperlukan terutama di instansi pemerintah. Upaya ini



juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Penetapan UU No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan Transparansi publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, Undang Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah Transparansi atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Pada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, setelah sembilan tahun berlakunya paket undang-undang tersebut, hampir belum ada kemajuan signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Opini BPK tentang LKPD di Indonesia Tahun 2012

NO	Opini	Jumlah entitas
1	WTP (Wajar tanpa pengecualian)	113
2	WDP (Wajar dengan pengecualian)	267
3	TMP (Tidak menyatakan pendapat)	31
4	TW (Tidak wajar )	4

Sumber: Siaran pers BPK RI (1 oktober 2013)

Siaran pers tersebut dapat dikemukakan bahwa masih terdapat beberapa LKPD yang menerima opini TW sedangkan yang memperoleh opini WDP jauh lebih besar dibandingkan dengan WTP, juga masih ada yang mendapatkan opini TMP. Dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan keuangan pemerintahan belum dilakukan dengan baik.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penelitian ini mengambil judul “  
PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) TERHADAP  
TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH (LKPD) “

## 1.2 Rumusan Masalah

Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dapat mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Y) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat mempengaruhi transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Operasional (Praktis)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi instansi atau lembaga dalam upaya mewujudkan penerapan SAP dalam membuat, memberikan dan mencapai Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang baik atas penggunaan dana publik yang dipercayakan masyarakat.

### 2. Manfaat Akademis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi bagi para mahasiswa/i dalam pengembangan teori Akuntansi Pemerintahan lebih khusus penerapan SAP dalam pencapaian Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).